

## MODUL 6

### SOSIALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

- **Pengertian Pancasila**

Sebelum melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai pancasila, tentunya komunikator harus terlebih dahulu memahami pancasila itu sendiri. Hal ini diperlukan agar komunikator tersebut dapat menyampaikan nilai-nilai pancasila dengan baik dan lengkap, sehingga *audience* dapat memahami nilai-nilai pancasila dengan baik dan tergugah untuk mewujudkan nilai-nilai pancasila tersebut serta menghindari multi tafsir ke arah negatif.

Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan kata sila. Panca artinya lima, sedangkan sila bermakna dasar. Kata “sila” diartikan sebagai aturan dasar yang melatarbelakangi perbuatan seseorang maupun bangsa sesuai adab dan moral<sup>80</sup>.

Sedangkan menurut terminologi, Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia. Penggunaan kata Pancasila sebagai suatu istilah pertama kali dikemukakan oleh Soekarno, saat mengucapkan pidato di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan lima hal untuk menjadi Dasar Negara Indonesia Merdeka dan memberi nama Pancasila<sup>81</sup>.

Sejarah menyatakan bahwa nilai-nilai dari Pancasila sudah diterapkan masyarakat Indonesia sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, seperti kerajaan

---

<sup>80</sup> Subandi Al Marsudi, *Pancasila Dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

<sup>81</sup> Imron Rosyadi, “Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara RI,” *Ishraqi* Vol. IV No (2008).

Sriwijaya di Sumatra pada abad VII-XII dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada abad XII-XVI. Adapun aktualisasi nilai tersebut antara lain adanya kepercayaan terhadap gaib, pemujaan terhadap roh baik dengan model dinamisme maupun animisme, masyarakat yang tolong-menolong, menjaga rasa aman, dan sebagainya<sup>82</sup>.

Istilah Pancasila sudah dikenal lama sejak zaman kerajaan di Indonesia pada masa kerajaan Majapahit yang digunakan sebagai pijakan moral hidup bangsa Indonesia. Tulisan mengenai nilai-nilai tersebut tercantum dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam kitab Sutasoma karya dari Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma terdapat Pancasila Krama (lima dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan) yang meliputi:

- Tidak boleh melakukan kekerasan (Ahimsi).
- Tidak boleh mencuri (Asteya).
- Tidak boleh berbuat dengki (Indiya Nugraha).
- Tidak boleh melakukan kebohongan (Amisawada).
- Tidak boleh minum-minuman keras (Dama).

Selain lima dasar moral di atas, dalam kitab Sutasoma disebutkan adanya semboyan Bhineka tunggal Ikatan Hana Dharma Mangruwa yang mempunyai arti walaupun agama itu mempunyai perbedaan baik bentuk maupun sifatnya, akan tetapi pada hakikatnya adalah satu juga. Semboyan inilah yang kemudian menjadi semboyan pada lambang negara Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika<sup>83</sup>.

Sebagai dasar negara, tentunya tokoh-tokoh negara memerlukan waktu untuk meruwuskannya, sehingga tercipta dasar negara yang adil, dimana dalam hal ini tidak merugikan segelintir pihak maupun golongan. Sejarah perumusan Pancasila terbagi kedalam beberapa tahap sebagai berikut<sup>84</sup>:

---

<sup>82</sup> Marsudi, *Pancasila Dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*.

<sup>83</sup> Marsudi.

<sup>84</sup> Bambang Doroeso, *Dasar Dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1989).

- Sidang BPUPKI Pertama (28 Mei – 1 Juni 1945)

Dalam sidang BPUPKI yang pertama beberapa tokoh mengemukakan gagasannya mengenai konsep negara. Berikut ini tokoh-tokoh yang mengemukakan konsep negara:

- Moh Yamin

Pertama, rumusan dari Moh. Yamin, yang dinyatakan secara lisan pada 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial (keadilan sosial). Selanjutnya Moh. Yamin kembali menuliskan pemikirannya dalam bentuk tulisan yang berisi Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Mr. Soepomo

Kedua, Mr. Soepomo menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat.

- Ir. Soekarno

Ketiga, Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945 dengan nama Pancasila yang di dalamnya berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan.

Setelah sidang BPUPKI pertama dilaksanakan, beberapa pihak juga turut merumuskan butir-butir pancasila, antara lain:

- Panitia Sembilan

Keempat, rumusan dari panitia sembilan/ Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berisi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anggota dari Panitia Sembilan antara lain sebagai berikut; 1) Ir. Soekarno, 2) Mr. Yamin, 3) KH. Wahid Hasyim, 4) Drs. Moh Hatta, 5) KH. Abdul Kahar Moezakir, 6) Mr. Maramis, 7) Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo, 8) Abi Kusno Tjokrosuejoso dan 9) H. Agus Salim.

- PPKI

Kelima, rumusan oleh PPKI/ pembukaan UUD 1945 18 Agustus 1945 berisi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Panitia Ketatanegaraan

Keenam, rumusan dari panitia ketatanegaraan/ konstitusi RIS 27 Desember 1949 sama dengan panitia bersama UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 berisi mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.

- Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)

Secara umum sidang kedua BPUPKI menekankan pembicaraan mengenai rumusan UUD serta susunan pemerintahan negara yang terdapat dalam penjelasan UUD. Dalam sidang kedua ini, Ir. Soekarno menjelaskan rumusan Piagam Jakarta yang telah disepakati, dimana Piagam Jakarta telah disetujui seluruh pihak maupun golongan<sup>85</sup>.

- Sidang PPKI

Pada sidang pertama panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 terjadi perubahan dalam Pancasila. Sidang ini membahas beberapa

---

<sup>85</sup> Kusmawi Basyir, *Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013).

perubahan Piagam Jakarta, terutama pada sila pertama yakni “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>86</sup>. Sidang PPKI dilaksanakan hingga empat kali. Namun bangun rumusan final Pancasila mencapai kesepakatan pada sidang yang pertama ini. Pada sidang-sidang selanjutnya lebih menitikberatkan membentuk konsep pemerintahan, pembagian wilayah dan membentuk komite nasional.

Dalam sejarahnya, periodisasi Pancasila terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

#### 7. Pancasila orde lama (1945-1966)

Pada masa ini juga dikenal dengan masa mempertahankan hidup. Dinamakan demikian karena bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya landasan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Banyak rintangan yang dihadapi, baik tantangan dari luar maupun dalam yang menimbulkan pemberontakan<sup>87</sup>.

Perlawanan yang terjadi saat itu yaitu<sup>88</sup>: (1) Perlawanan antara golongan yang menghendaki dengan cara yang tegas tanpa kompromi dari kalangan militer, dan golongan yang bersikap halus untuk melawan kembali penjajahan dengan kombinasi yang menimbulkan semangat perjuangan. (2) Antara kelompok yang menginginkan dilaksanannya sistem liberal, demokrasi parlementer ala Barat, dengan sistem Multi partai, kelompok yang menginginkan demokrasi terpimpin dengan sistem partai tunggal, dan Artai Nasional yang dipimpin secara nasional oleh Kepala Desa dan kepala Adat. (3) Masyarakat yang berkeinginan penerapan syariat islam dalam konstitusi dan masyarakat yang tidak mau menerapkan syariat islam.

---

<sup>86</sup> Basyir.

<sup>87</sup> A.Y Soegeng, *Memahami Sejarah Bangsa Indonesia* (Salatiga: Widya Sari Press, 2002).

<sup>88</sup> Soegeng.

Pada masa ini, pemerintahan Indonesia menganut Republik Indonesia Serikat yang nantinya negara akan berstatus sebagai negara bagian saja. Pemerintah membentuk negara-negara kecil yaitu: Negara Indonesia Timur (1946), Negara Sumatera Timur (1947), Negara Pasundan (1948), Negara Sumatera selatan (1948), Negara Jawa Timur (1948) dan Negara Madura (1948). Selain negara yang telah disebutkan, pemerintah menyiapkan pembentukan daerah-daerah lain, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Banjar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah<sup>89</sup>.

Pelaksanaan demokrasi liberal ini merupakan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, ditandai dengan pelaksanaan parlementer yang menggantikan kabinet presidensial yang mana hal ini bertentangan dengan UUD 1945. Dengan diterapkannya sistem ini, semakin menguatkan kedudukan parlemen di dalam pemerintahan karena kekuatan terkuat didukung dan dikuasai oleh partai-partai dan angkatan bersenjata<sup>90</sup>.

Pada tahun 1955 dilaksanakan pemilu untuk pertama kalinya, akan tetapi efek dari pemilu ini belum membuahkan hasil. Bahkan, mengganggu kestabilan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu<sup>91</sup>:

- Modal-modal raksasa semakin menguasai perekonomian Indonesia
- Akibat dari pergantian kabinet menyebabkan pemerintah tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat menuju arah pembangunan, yang utama adalah pembangunan dalam bidang ekonomi.
- Tidak adanya kestabilan akibat dari diterapkannya sistem liberal yang berdsarakan UUDS 1950.

---

<sup>89</sup> Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

<sup>90</sup> Syarbaini.

<sup>91</sup> Syarbaini.

- Pemilu pada tahun 1955 dalam tubuh DPR terjadi ketimpangan yang mengakibatkan tidak adanya keseimbangan kekuasaan politik, karena banyak golongan-golongan di berbagai daerah belum terwakili oleh DPR.
- Kegagalan Konstituante dalam pembentukan UUD yang baru.

Demokrasi terpimpin merupakan sistem yang diterapkan oleh Soekarno yang bertujuan peristiwa yang telah terjadi tidak terulang kembali. Demokrasi ini mempunyai paham yang tidak didasarkan pada paham liberalisme, sosialisme-nasional, fasisme, dan komunisme. Akan tetapi, paham demokrasi yang didasarkan pada cita-cita dan keinginan luhur bangsa Indonesia<sup>92</sup>.

Ideologi Pancasila pada masa ini dirancang oleh PKI untuk diganti dengan ideologi Manipol Usdek dan berkonsep Nasakom. Dengan cara inilah PKI berusaha untuk memantapkan kekuasaannya dengan membangun komunis jaringan internasional dengan RRC yang puncaknya menyebabkan meledaknya peristiwa G 30 S/PKI<sup>93</sup>.

Menanggapi adanya Manipol Usdek, sikap NU mengambil kompromi dengan mau menerima Manipol Usdek dan berusaha menata orientasi politik. Berbeda dengan Masyumi yang bersikap oposisi yang mengakibatkan para pemimpin mereka banyak yang ditangkap dan dipenjar<sup>94</sup>. Pada periode ini bisa dikatakan tidak tergoyahkan, akan tetapi pelaksanaan yang diterapkan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

#### 8. Pancasila orde baru (11-1-1966 s.d 21-5-1998)

Periode orde baru menerapkan sistem tatanan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara

---

<sup>92</sup> Syarbaini.

<sup>93</sup> Syarbaini.

<sup>94</sup> Sri Hartini Dwiyatmi, *Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)*.

murni dan konsekuen. Hal ini diawali adanya aksi tuntutan dari masyarakat, seperti aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan sebagainya. Tuntutan mereka dikenal dengan tritura yang berisi mengenai pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur G30S/PKI, dan tuntutan mengenai penurunan harga<sup>95</sup>.

Pemerintah orde baru melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka “Revolusi Indonesia belum selesai”. Dalam hal ini, Pancasila mengalami reduksi menjadi Ajimat keempat dari Panca Ajimat revolusi. Selain itu, pemerintah juga menafsirkan sila-sila kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan membelok dan mengakibatkan ancaman pada sila ketiga<sup>96</sup>.

Sesuai fakta, masa orde baru pemerintah melakukan penyimpangan- penyimpangan yang jauh dari perjuangan semula. Diantara penyimpangan yang ada adalah<sup>97</sup>:

- Tidak mengakui tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila
- Butir-butir P4 secara tidak langsung mendidik untuk taat kepada penguasa dan di dalamnya tidak mencantumkan kewajiban sebuah negara terhadap rakyatnya.
- Terjadinya rekayasa untuk mendukung Bapak Pembangunan melalui pengamalan Pancasila sebagai bentuk pencitraan dari pembangunan.

Selain itu, Pancasila juga dimanipulasi oleh pemerintah. Mereka mengganti tanggal 1 Juni menjadi tanggal 1 Oktober sebagai hari kelahiran Pancasila. Tanggal tersebut dipilih dengan alasan untuk mengingat keberhasilan bangsa Indonesia di bawah pimpinan Soeharto karena menumpas gerakan G30

---

<sup>95</sup> Syarbaini, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*.

<sup>96</sup> Syarbaini.

<sup>97</sup> Syarbaini.



S/PKI. Peristiwa selanjutnya, Soeharto membuat Pancasila menjadi berlawanan dengan Islam dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dia menjadikan Islam dan Pancasila bertentangan semakin kuat dengan diberlakukannya penutupan wacana yang berada di luar Pancasila selama dua periode. Puncaknya terjadi pada tahun 1985, Soeharto berhasil menerapkan Pancasila sebagai azas kehidupan dengan siasat politiknya<sup>98</sup>.

Selanjutnya pada periode ini juga ditetapkannya asas tunggal Pancasila oleh Soeharto saat pidatonya tanggal 16 Agustus 1982 bagi partai politik. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik ideologis pada partai-partai politik. Kelemahan pada orde baru adalah tertutupnya sumber-sumber ekonomi di ruang publik, sehingga menghambat pemerataan dan banyak menjadikan pendapatan sebagai korban dari sistem ini<sup>99</sup>.

#### 9. Pancasila Reformasi (1998-sekarang)

Pada bagian ini, akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa<sup>100</sup>:

- Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila

---

<sup>98</sup> Syarbaini.

<sup>99</sup> Syarbaini.

<sup>100</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016).

dibubarkan berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.

- Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.

- Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati

Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.

- Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).

- **Nilai-nilai Pancasila**

Dalam setiap butir Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tentunya terkandung nilai-nilai kebaikan yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi diri sendiri, dengan keluarga maupun masyarakat. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat mewujudkan masyarakat yang madani. Berikut ini pembahasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila:

- Nilai Ketuhanan (Ketuhanan yang Maha Esa)

Dalam sila pertama yakni “Ketuhanan yang Maha Esa” mengandung nilai mengenai ketuhanan. Sila pertama menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang beragama dimana masyarakat Indonesia meyakini, memiliki serta menganut agama dan percaya akan Tuhan. Sila pertama ini juga menunjukkan bahwa landasan pertama dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah agama, sehingga tidak heran jika masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tergolong agamis serta menjalankan perintah maupun aturan-aturan agama yang dianutnya. Nilai ketuhanan dapat diimplementasikan dengan cara atau hal berikut ini:

- Percaya akan tuhan dan menjalankan ajaran dan perintah agama yang dianut.
- Menghormati agama lain serta orang-orang yang menganutnya.
- Tidak memaksakan suatu agama kepada individu ataupun kelompok yang telah memiliki agama.
- Menjalankan ibadah dengan baik dan benar.
- Tidak mengganggu pihak lain dalam menjalankan ibadahnya.

- Tetap bahu-membahu, saling membantu dan bergotong-royong dalam kehidupan sehari-hari walaupun memiliki agama yang berbeda.
- Saling menghormati dan tetap rukun walaupun memeluk agama yang berbeda.
- Menjalankan ibadah dengan bebas tanpa dihalang-halangi pihak lain.
- Tidak menjelekan ataupun merendahkan agama lain.
- Nilai Kemanusiaan (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)

Dalam sila kedua yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung nilai mengenai kemanusiaan. Sila kedua ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Nilai kemanusiaan dapat diimplementasikan dengan cara atau hal berikut ini:

- Turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.
- Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Mengakui harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang sederajat, memiliki hak serta kewajiban yang setara.
- Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Saling tolong-menolong.
- Menunjukkan sikap tenggang rasa dan menyayangi satu sama lain.
- Menjunjung tinggi kemanusiaan.
- Membela keadilan dan kebenaran.
- Membantu orang lain yang sedang kesulitan (melaksanakan kegiatan kemanusiaan).
- Nilai Persatuan (Persatuan Indonesia)

Dalam sila ketiga yakni “Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan. Sila ketiga ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus tetap bersatu walaupun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu agama, ras, bahasa dan sebagainya. Nilai persatuan dapat diimplementasikan dengan cara atau hal berikut ini:

- Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
- Menghormati perbedaan agama, suku, ras, etnik dan budaya.
- Tetap bersatu walaupun berbeda-beda (Bhineka Tunggal Ika).
- Menjunjung tinggi kesatuan, persatuan serta kepentingan negara.
- Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.
- Nilai Kerakyatan  
(Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan)

Dalam sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” mengandung nilai mengenai kerakyatan. Sila keempat ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai kerakyatan dan musyawarah untuk mencapai ataupun mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Nilai kerakyatan dapat diimplementasikan dengan cara atau hal berikut ini:

- Tidak mementingkan keputusan atau kepentingan sendiri.
- Tidak memaksakan keputusan kepada pihak lainn.
- Melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan yang melibatkan banyak pihak untuk kepentingan bersama.
- Keputusan musyawarah yang diambil tidak merugikan atau menyulitkan sejumlah pihak.
- Melakukan musyawarah dengan baik dan benar tanpa adanya intervensi menyangkut keputusan yang akan diambil.
- Nilai Keadilan (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Dalam sila kelima yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung nilai keadilan. Sila kelima ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus mengutamakan keadilan dalam hal yang dilakukannya agar tidak merugikan ataupun mengurangi nilai hak pihak lain. Nilai keadilan dapat diimplementasikan dengan cara atau hal berikut ini:

- Menghormati hak orang lain.
- Tidak semena-mena terhadap hak orang lain.
- Tidak mengutamakan hak pribadi semata.
- Melaksanakan kewajiban dengan baik.
- Tidak mengurangi nilai hak yang dimiliki orang lain.
- Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki.
- Tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan hak orang lain.
- Tidak mengambil maupun memanipulasi hak orang lain.
- Tidak melakukan diskriminasi yang berkaitan dengan hak.
- Bersikap adil dan tidak pilih kasih.
- Bersikap objektif terhadap suatu hal.

- **Sosialisasi**

Menurut Soekanto sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya<sup>101</sup>. Selanjutnya David A. Goslin dalam Ihromi menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya<sup>102</sup>. Selain itu William J. Goode berpendapat jika sosialisasi dapat dipahami sebagai proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai

---

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

<sup>102</sup> Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di kelompok tersebut<sup>103</sup>.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sosialisasi merupakan proses penyampaian serta penanaman ilmu, nilai maupun aturan yang dilakukan melalui proses komunikasi dari komunikator pada komunikan (audience), generasi ke generasi, individu pada kelompok serta kelompok pada kelompok dalam suatu masyarakat.

Berger dan Luckman dalam Ihromi membedakan sosialisasi atas dua tahap, berikut pembahasannya<sup>104</sup>:

- Sosialisasi Primer

Merupakan sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, pada tahap ini individu menjadi anggota masyarakat. Selain itu dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian seorang individu (anak), pada tahap ini keluarga adalah pihak yang paling berperan dimana keluarga sebagai agen sosialisasi.

- Sosialisasi Sekunder

Merupakan proses sosialisasi berikutnya, dimana individu telah disosialisasikan dalam masyarakat. Dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme serta pihak yang agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, *peer group*, lembaga pekerjaan, dengan kata lain lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Menurut sifatnya sosialisasi dibagi dua, yakni sosialisasi otoriter dan sosialisasi ekualitas<sup>105</sup>:

- Sosialisasi Otoriter

Merupakan sosialisasi yang menanamkan norma-norma sosial yang mengandung suatu keharusan agar taat dan melaksanakan kewajiban serta menghormati ataupun tunduk pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan superior,

---

<sup>103</sup> William J Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

<sup>104</sup> Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi*.

<sup>105</sup> Narwoko and Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007).

berwibawa serta patut dihormati. Seringkali terdapat pemaksaan dalam sosialisasi ini. Pihak-pihak yang melaksanakan maupun terlibat dalam sosialisasi ini pada umumnya memiliki wibawa dan kekuasaan atas pihak (individu/kelompok) yang disosialisasi. Pihak-pihak ini antara lain orang tua, guru, atasan, pemimpin dan sebagainya.

- **Sosialisasi Ekualitas**

Merupakan sosialisasi yang dilakukan atas dasar asas kesamaan dan kooperasi antara pihak yang melakukan sosialisasi dengan pihak yang disosialisasi. Pihak-pihak yang melaksanakan maupun terlibat dalam sosialisasi ini merupakan pihak yang memiliki kedudukan sejajar atau sederajat dengan pihak (individu/kelompok) yang disosialisasi. Tujuan sosialisasi ini antara lain untuk agar pihak yang disosialisasi dapat memahami serta bekerjasama secara koordinatif dan kooperatif. Tidak terdapat unsur paksaan dalam proses sosialisasi ini, melainkan sosialisasi dilakukan dengan santai dan terbuka, misalnya dengan berbagi cerita ataupun pengalaman. Pihak-pihak ini antara lain saudara, teman sebaya, teman sepermainan dan sebagainya.

- **Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila**

Merupakan proses penyampaian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimana sosialisasi ini bertujuan untuk menggugah maupun menanamkan nilai-nilai yang dimiliki Pancasila kepada audience, dengan harapan audience dapat mengetahui, memahami, memaknai, menerapkan serta melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan maupun pergaulan sehari-hari.

Sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari *audience*, misalnya oleh guru kepada murid, dosen kepada mahasiswa/I ataupun badan pemerintah (misalnya kementerian) kepada masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan jika sosialisasi Pancasila dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan *audiencenya*, mengingat pada saat ini generasi muda Indonesia sudah mulai *aware* dengan politik maupun hal-hal yang



berkaitan dengan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah Pancasila.

Pihak yang melakukan sosialisasi atau komunikator dituntut untuk dapat menyampaikan nilai-nilai Pancasila dengan baik kepada *audience*, dalam artian mudah dipahami, menarik serta dapat menggugah *audience* untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini komunikator harus dapat memahami dan menyesuaikan *audiencenya*, misalnya seorang komunikator akan melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda atau mahasiswa/I, maka dari itu komunikator dapat menyampaikan sosialisasinya dengan gaya yang tidak terlalu formal (santai), melontarkan pertanyaan kepada *audience*, memberi contoh mengenai nilai-nilai Pancasila dengan hal yang dekat atau relevan dengan *audience* serta membuat kegiatan diskusi.

Hal yang paling penting dari sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana sosialisasi yang dilaksanakan dapat menggugah *audience* untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Secara lebih luas sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat memupuk rasa nasionalisme maupun cinta tanah air serta mendorong masyarakat Indonesia untuk menjadi individu yang lebih baik.

#### • RANGKUMAN

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisi lima sila yaitu; 1) Ketuhanan yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan kata sila. Panca artinya lima, sedangkan sila bermakna dasar. Kata “sila” diartikan sebagai aturan dasar yang melatarbelakangi perbuatan seseorang maupun bangsa sesuai adab dan moral. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai kebaikan yang patut diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi diri sendiri, dengan keluarga maupun masyarakat. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat mewujudkan masyarakat yang madani.

Sosialisasi merupakan proses penyampaian serta penanaman ilmu, nilai maupun aturan yang dilakukan melalui proses komunikasi dari komunikator pada komunikan (*audience*), generasi ke generasi, individu pada kelompok serta kelompok pada kelompok dalam suatu masyarakat. Sosialisasi terbagi atas dua tahap yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Selanjutnya menurut sifat sosialisasi dibedakan menjadi sosialisasi otoriter dan sosialisasi ekualitas.

Sosialisasi pancasila adalah penyampaian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimana sosialisasi ini bertujuan untuk menggugah maupun menanamkan nilai-nilai yang dimiliki Pancasila kepada audience, dengan harapan audience dapat mengetahui, memahami, memaknai, menerapkan serta melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan maupun pergaulan sehari-hari.

## **TES FORMATIF**

### **• PILIHAN GANDA**

1. Pancasila berasal dari bahasa...
  - a. Sanksekerta
  - b. Majapahit
  - c. Sriwijaya
  - d. Mataram
  
2. Pancasila terdiri dua kata yaitu Panca dan Sila yang memiliki makna...
  - a. Lima dasar
  - b. Kelima nilai
  - c. Lima petuah
  - d. Kelima nasehat

3. Istilah pancasila telah dikenal sejak masa kerajaan...
  - a. Majapahit
  - b. Padjadjaran
  - c. Sriwijaya
  - d. Sutasoma
  
4. Dalam kitab Sutasoma terdapat Panca Krama, salah satu butir dalam Panca Krama adalah “Indiya Nugraha” yang memiliki makna...
  - a. Tidak boleh mencuri
  - b. Tidak boleh berbuat dengki
  - c. Tidak boleh berbicara kasar
  - d. Tidak boleh berjudi
  
5. Berikut ini tokoh maupun pihak yang mengemukakan pendapatnya mengenai isi rumusan Pancasila, kecuali...
  - a. Panitia sembilan
  - b. Moh. Yamin
  - c. Ir. Soekarno
  - d. Moh. Hatta
  
6. “Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan”, merupakan gagasan rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh...
  - a. Ir. Soekarno
  - b. Panitia sembilan
  - c. Moh. Yamin
  - d. BPUPKI
  
7. Menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut tanpa intervensi dari pihak lain, merupakan nilai yang terkandung dalam butir pancasila yang berbunyi...
  - a. Persatuan Indonesia
  - b. Ketuhanan yang Maha Esa

- c. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  - d. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
8. Rela berkorban demi kepentingan bangsa Indonesia, merupakan nilai yang terkandung dalam butir Pancasila yang berbunyi...
- a. Ketuhanan yang Maha Esa
  - b. Persatuan Indonesia
  - c. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  - d. Piagam Pancasila
9. “Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya”, merupakan pengertian sosialisasi menurut...
- a. David A. Goslin
  - b. Alo Liliweri
  - c. William J. Goode
  - d. Kuntjoro
10. Seorang guru menyampaikan bahaya membuang sampah sembarang dan meminta muridnya untuk peduli akan kebersihan lingkungan, hal ini termasuk ke dalam sosialisasi...
- a. Sosialisasi otoriter
  - b. Sosialisasi ekualitas
  - c. Sosialisasi primer
  - d. Sosialisasi komunikator

• **LATIHAN**

1. Mengapa abdi negara harus dapat memberikan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila dengan baik?
2. Jelaskan sosialisasi menurut sifatnya dan berikan contoh!

3. Mengapa sosialisasi primer menjadi tahap paling penting dalam membentuk pribadi individu?
4. Tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila!
5. Uraikan dengan singkat dan jelas periode Pancasila!